



LAPORAN DELEGASI DPR RI KE SIDANG UMUM KE-34 ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA)

17 - 23 SEPTEMBER 2013, BRUNEI DARUSSALAM

I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI

Partisipasi Delegasi DPR RI dalam Sidang Umum ke-34 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) pada tanggal 17 – 23 September 2013 di Brunei Darussalam, didasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor: 70/PIMP/I/2013-2014 tanggal 10 September 2013.

B. SUSUNAN DELEGASI

Susunan Delegasi DPR RI ke Sidang Umum ke-34 AIPA adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| 1. Yth. Dr. H. Marzuki Alie | Ketua DPR RI/ Ketua Delegasi |
| 2. Yth. Drs. H. Priyo Budi Santoso | Wakil Ketua bid. Korpolkam/
Wakil Ketua Delegasi |
| 3. Yth. Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A. | Ketua BKSAP/ Anggota
Delegasi/ F-PKS |
| 4. Yth. H. Andi Anzhar CakraWijaya, S.H. | Wakil Ketua BKSAP/ Anggota
Delegasi/ F-PAN/ |
| 5. Yth. Ir. Atte Sugandi, M.M. | Anggota Delegasi/F-PD |
| 6. Yth. Ida Ria Simamora | Anggota Delegasi/F-PD |
| 7. Yth. Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA. | Anggota Delegasi/F-PG |
| 8. Yth. Selina Gita | Anggota Delegasi/F-PG |
| 9. Yth. Nazarudin Kiemas | Anggota Delegasi/F-PDIP |
| 10. Yth. Vanda Sarundajang | Anggota Delegasi/F-PDIP |
| 11. Yth. H. Iskan Qolba Lubis, M.A. | Anggota Delegasi/F-PKS |
| 12. Yth. Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si. | Anggota Delegasi/F-PPP |
| 13. Yth. H. Marwan Ja'far, S.E., S.H. | Anggota Delegasi/F-PKB |

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGIRIMAN DELEGASI

Maksud dan tujuan pengiriman Delegasi DPR RI ke Sidang Umum ke-34 AIPA antara lain adalah dalam rangka memenuhi Tata Tertib DPR RI pasal 76 poin a yaitu membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain; serta pasal 77 poin c yaitu mengadakan kunjungan dan/atau menghadiri pertemuan persahabatan mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya atau penugasan atau persetujuan pimpinan DPR

D. MISI DELEGASI

Adapun misi Delegasi DPR RI mengikuti Sidang-sidang tersebut, antara lain adalah:

1. Mendorong peran serta dari para anggota AIPA dalam upaya menyukseskan pembentukan ASEAN Community 2015 melalui penguatan peran AIPA di kawasan
2. Mempererat kerjasama regional antar negara di kawasan dan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN
3. Memperkuat peran Sound-Track Diplomacy Indonesia di tingkat regional dan internasional
4. Mendorong AIPA agar menghasilkan resolusi-resolusi yang implementatif dan solutif.

E. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

a. Persiapan Materi

Materi yang dijadikan referensi bagi Delegasi DPR RI diolah oleh Tenaga Ahli BKSAP dan disusun berdasarkan masukan yang komprehensif dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan.

b. Rapat Delegasi

Sebelum pelaksanaan Sidang Umum ke-34 AIPA, Delegasi DPR RI telah mengadakan 2 (dua) kali rapat delegasi yaitu pada tanggal 27 Agustus 2013 dan tanggal 5 September 2013 dengan mengundang Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait untuk menerima masukan isu-isu terkait dan koordinasi persiapan materi Delegasi dalam setiap sesi persidangan. Selain itu, pada tanggal 3 September 2013 juga telah dilaksanakan pertemuan Ketua BKSAP, Dr. KH. Surahman Hidayat, MA selaku perwakilan Delegasi dengan Ketua DPR RI, Dr. H. Marzuki Alie, selaku Ketua Delegasi untuk membahas beberapa persiapan teknis dan substantif Delegasi.

c. DPD RI

Menanggapi surat dari Pimpinan DPD RI perihal permintaan agar DPD RI dapat menjadi bagian dari Delegasi DPR RI ke Sidang Umum ke-34 AIPA, Ketua DPR RI menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena hal ini sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam Statuta AIPA bahwa Anggota AIPA yang sudah diakui secara resmi adalah DPR RI.

II. ISI LAPORAN

A. URAIAN TENTANG SITUASI UMUM PERSIDANGAN

Sidang Umum ke-34 AIPA yang telah berlangsung tanggal 17-23 September 2013 di the Empire Hotel & Country Club, Jerudong - Brunei Darussalam dengan tema “*The Role of AIPA in Realizing ASEAN Community*”, dihadiri oleh 10 (sepuluh) Parlemen Anggota AIPA yaitu: Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam; 7 (tujuh) Parlemen Observers: Belarus, Kanada, China, Parlemen Eropa, India, Jepang, Federasi Rusia; serta 4 (empat) *Guest of the Host* yakni: Perwakilan *Secretary General of ASEAN*; *Vice Secretary General of IPU*; *Representative of ASEAN-WEN*; dan *Representative of Special Adviser for UN on the prevention of Genocide*.

Sidang Umum ke-34 AIPA terdiri rangkaian sidang sebagai berikut:

Pada tanggal 18 September telah dilaksanakan **Sidang Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)** pada pukul 09.00 dan **Sidang Executive Committee** pada pukul 16.00. Sidang *Executive Committee* (EXCOM) dibuka dan dipimpin oleh Presiden AIPA dengan dihadiri oleh para Ketua Delegasi dan perwakilan anggota Delegasi dari setiap Parlemen Anggota AIPA. Pada Sidang EXCOM disepakati agenda-agenda Sidang AIPA ke-34 yang akan dibahas pada Sidang Komisi Politik, Ekonomi, Sosial, dan Organisasi.

Keesokan harinya, tanggal 19 September 2013 pukul 09.00, dilaksanakan **Courtesy Call** para Ketua Delegasi Anggota AIPA, Negara Peninjau, dan Guest of the Host dengan Presiden ke-34 AIPA, **H.E Pehin Haji Awang Ibrahim**. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPR RI, **Dr. H. Marzuki Alie**, selaku Ketua Delegasi Parlemen Indonesia hadir dalam acara tersebut. Selanjutnya, Sidang Umum ke-34 AIPA secara resmi dibuka oleh **Sultan Hassanal Bolkiah** pada acara **Opening Ceremony** pukul 10.30. Dalam sambutannya, Sultan Hassanal Bolkiah menyatakan bahwa masyarakat ASEAN harus bekerjasama demi kemajuan kawasan. Para Parlemen anggota AIPA juga harus berkontribusi aktif dalam upaya menjaga kestabilan dan keamanan kawasan secara berkelanjutan. Sidang Umum AIPA ke 34 harus dapat mengakomodasi elemen-elemen penting yang menjadi perhatian masyarakat

ASEAN. Parlemen harus dapat menjembatani dan mengkomunikasikan pencapaian ASEAN kepada masyarakat.

Setelah Opening Ceremony, pada pukul 13.30 diselenggarakan **Sidang Pleno Pertama** Sidang Umum ke-34 AIPA. Pada kesempatan tersebut, seluruh Ketua Delegasi AIPA, *Observers* dan *Guests of the Host* menyampaikan statement-nya. Dalam pidatonya, **H.E. Pehin Haji Awang Ibrahim** mengakui pentingnya kolaborasi dan koordinasi erat diantara semua pemangku kepentingan dalam upaya pembentukan Komunitas ASEAN2015 dan pasca 2015, sesuai tema SIUM ke-34 AIPA yaitu “*The Role of AIPA in realising the ASEAN Community*”.

Pada tanggal 20 September 2013, dilaksanakan Sidang-sidang Komisi dan Dialog with *Observers* secara paralel. **Sidang-sidang Politik, Ekonomi, Sosial, dan Organisasi** berlangsung pada pagi hari sedangkan **Dialog with Observers** berlangsung pada siang hingga sore hari.

Pada tanggal 21 September 2013 pukul 19.00, dilaksanakan **Sidang Joint Communique** yang membahas isi Joint Communique berupa inti sari hasil-hasil persidangan yang telah dilaksanakan.

Seluruh rangkaian persidangan AIPA berakhir pada **Sidang Pleno Kedua** yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2013 dengan agenda penyampaian dan pengadopsian *Report* dari masing-masing Ketua Komisi sekaligus mengesahkan Draft-draft Resolusi AIPA. Delegasi DPR RI diwakili oleh **Yth. Drs. Priyo Budi Santoso, Yth. Dr. KH. Surahman Hidayat, MA, dan Yth. Sdr. Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA.**

Pada Sidang Pleno Kedua diberikan akreditasi secara resmi kepada Parlemen Timor Leste untuk menjadi Observer AIPA. Selanjutnya, diumumkan bahwa Sidang Umum ke-35 AIPA akan diselenggarakan di Vientienne, Lao PDR pada tanggal 14-20 September 2014. Agenda dilanjutkan dengan penandatanganan *Joint Communique* oleh para Ketua Delegasi AIPA sebagai salah satu hasil penting Sidang Umum ke-34 AIPA.

Acara dilanjutkan dengan *Transfer of Office of 34th AIPA President* yang ditandai dengan penyerahan *Palu AIPA* oleh **Hon. Mr. Pehin Dato Hj. Judin Hj. Asar** kepada Ketua Delegasi Lao PDR selaku *the Incoming 35th AIPA President*.

Presiden Sidang Umum AIPA ke 35, Lao PDR, menerima mandat sebagai tuan rumah *35th AIPA General Assembly*. Lao PDR juga menyampaikan bahwa dalam rangkaian Sidang Umum AIPA ke 34, para parlemen anggota AIPA telah mempererat kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan para perwakilan negara observer dan para *Guests of the Host*. Presiden AIPA mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk dapat mengemban tugas yang akan datang. Presiden AIPA juga

mengundang para delegasi untuk menghadiri Sidang Umum AIPA ke 35 di Laos pada tahun 2014 mendatang.

Presiden *34th AIPA General Assembly* menyampaikan pidato penutupan bahwa melalui Sidang Umum ke-34 AIPA ini, berbagai hasil positif telah dicapai, diantaranya adalah *Joint Communique* yang isinya merepresentasikan cita-cita AIPA dan memberikan kontribusi terhadap masa depan kawasan.

Pada Sidang tersebut, dilakukan penandatanganan *Joint Communique* oleh seluruh Ketua Delegasi Parlemen Anggota AIPA atau yang mewakili.

B. AGENDA SIDANG

Sidang Umum ke-34 AIPA membahas agenda-agenda items yang sudah disepakati pada Sidang Executive Committee, yaitu sebagai berikut:

Political Matters

1. Supporting The ASEAN Political Security Community
2. Report of the 5th AIPA Caucus held in Da Lat, Viet Nam

Economic Matters

1. Fostering the Growth and Sustainable Development of SME (Small Medium Enterprise)
2. Promoting the Role of AIPA in Response to the Challenges of ASEAN Economic Community and Supporting Green Growth

Social Matters

1. Nurturing the Role of Young People for the Future Challenges of ASEAN
2. Role of AIPA in Advancing the Post 2015 Development Agenda
3. Cooperation toward Child Abuse Free ASEAN
4. Report of the Meeting of the 10th AIPA Fact Finding Committee to Combat the Drug Menace (AIFOCOM) held in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam

Women of AIPA (WAIPA): Advocating Maternal And Child Health In ASEAN

Organizational Matters:

1. Secretariat Annual Report FY 2012–2013
2. AIPA Secretariat Workplan 2013
3. Amendment to the AIPA Staff Regulations
4. Financial Reports of the AIPA Secretariat
5. Budget Proposal for the AIPA Secretariat for the Period 1 October 2013 to 30 September 2014
6. Amendment to the Statutes of AIPA
7. The New Organization Chart for AIPA and AIPA Secretariat
8. The Discharge of Mr. Edy Suhardi due to his incapacity in Performing his Duties because of Ill Health

9. Awareness Building Program
10. Continuation of the Joint Program between AIPA and The German Federal Foreign Office (FFO) through GIZ and Hanns Seidel Foundation (HSF)
11. Accrediting the National Parliament of Timor Leste as an Observer of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)
12. Amendment of Term of Reference (TOR) of Technical Working Group (TWG) of AIFOCOM
13. Amendment of Term of Reference (TOR) of AIPA Caucus
14. Information on the Implementation of Adopted AIPA Resolutions
15. Implementation Cooperation between AIPA and ASEAN Foundation by Signing MoU
16. Purchase of an Apartment as Residence for AIPA Secretary General
17. Appreciating the Services of His Excellency Pehin Dato Isa bin Ibrahim as President of 34th AIPA from September 2012 to September 2013
18. Expressing Gratitude for the Services of Former AIPA Secretary General Hon. Antonio Veloso Cuenco
19. Date and Venue of the 35th General Assembly

Topic Discussion with Observers: Enhancing Cooperation with Dialogue Partners.

C. PARTISIPASI DELEGASI DPR RI

Delegasi DPR RI telah berpartisipasi aktif dalam setiap persidangan baik dalam Sidang-sidang Komisi, *Joint Communique* maupun dalam *Dialogue With Observers*.

Sidang WAIPA

Sidang Women Parliamentarian of AIPA (WAIPA) dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Legislatif Brunei Darussalam/Presiden ke-34 AIPA, **YM. Pehin Haji Awang Ibrahim**. Dalam pidato pembukaannya, Presiden AIPA menyampaikan selamat datang kepada seluruh Delegasi dan memaparkan agenda topik yang akan didiskusikan dan diusulkan oleh tuan rumah, yaitu "*Advocating Maternal and child health in ASEAN*".

Pertemuan *Women Parliamentarians of AIPA* (WAIPA) dipimpin oleh **Hon. Datin Paduka Hajah Zasia**, anggota parlemen Brunei Darussalam, dan dihadiri oleh wakil-wakil parlemen negara-negara ASEAN yang menangani isu perempuan. Delegasi DPR RI terdiri dari **Yth. Sdri. Dra. Hj. Okky Asokawati, Yth. Sdri. Ida Ria Simamora, Yth. Sdri. Selina Gita, dan Yth. Sdri. Vanda Sarundajang**.

Pertemuan membahas draft resolusi mengenai *Advocating Maternal and Child Health in ASEAN* yang menggarisbawahi pentingnya peningkatan kesehatan ibu dan anak di ASEAN dalam rangka memastikan masa depan ASEAN yang lebih baik. Delegasi Brunei Darussalam menyampaikan penjelasan terhadap agenda topik yang diajukan bahwa para pemimpin politik harus menyadari pentingnya kesehatan perempuan dan anak-anak sebagai bagian penting dari masyarakat ASEAN. Hal ini juga terkait dengan salah satu upaya pencapaian MDGs. ASEAN Ministerial

Meeting juga secara khusus telah mengakomodasi pentingnya aspek kesehatan sebagai salah satu aspek penting dari ASEAN Socio-Cultural Blueprint. Anggota Parlemen Perempuan AIPA harus terus berjuang untuk memperbaiki kondisi kesehatan perempuan dan anak-anak. Mengingat sampai saat ini tujuan pencapaian MDGs ke-5, yaitu pengurangan angka kematian Ibu dan anak, masih berjalan lambat, maka peran WAIPA dalam hal ini adalah terus memastikan komitmen dari para pemimpin dan pemangku kepentingan di negara-negara anggota ASEAN tentang semua aspek yang terkait kesehatan ibu dan anak.

Anggota Delegasi Perempuan DPR RI berpartisipasi aktif dalam memberikan intervensi. Mengenai MDGs 4 dan 5, Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam mencapai MDGs 5 yang berhubungan dengan maternal mortality rate. Upaya untuk memperbaiki kondisi kesehatan ibu dan anak harus selaras dengan upaya lainnya, termasuk mengembangkan infrastruktur kesehatan dan pengalokasian dana yang memadai. Investasi terhadap kesehatan ibu dan anak sangat penting untuk dilakukan, karena akan berpengaruh pula terhadap kesejahteraan masyarakat. Delegasi DPR RI menyampaikan bahwa langkah-langkah nyata dalam mengurangi kematian Ibu dan anak telah dilaksanakan baik secara nasional, regional dan internasional. Dalam hal ini, strategi nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia antara lain adalah pemberian jaminan persalinan untuk pasien miskin sejak tahun 2011 dan gerakan nasional "*Maternal and Child Health Movement*". Pada tingkat regional dan internasional, Indonesia terus aktif dalam berbagai forum untuk memastikan tercapainya upaya pengurangan kematian Ibu dan anak.

Delegasi Indonesia menyampaikan beberapa usulan amandemen, diantaranya mengenai penggunaan frase "cultural change" dalam Operative Paragraph 1, agar diganti dengan "cultural contexts" karena pada dasarnya, budaya akan sulit untuk diubah, tetapi kita dapat memberikan pendidikan kesehatan yang selaras dengan budaya setempat. Delegasi Indonesia juga menyarankan agar Draft Resolusi mengakomodasi perlunya peningkatan sarana fasilitas kesehatan. Sidang juga menyetujui perubahan judul Resolusi.

Sidang WAIPA menyetujui Draft Resolusi Fostering Maternal and Child Health in ASEAN dan Report Sidang WAIPA untuk diadopsi pada Sidang Pleno Kedua.

Sidang Executive Committee

Delegasi DPR RI yang hadir pada Sidang ini yaitu Ketua DPR RI, **Yth. Dr. Marzuki Alie**, dan Ketua BKSAP, **Yth. Dr. KH. Surahman Hidayat, MA**. DelRI mengajukan 2 (dua) tambahan agenda untuk Komisi Ekonomi yaitu: "*The Role of AIPA in Response to the Challenges of ASEAN Economic Community*" dan "*The Role of AIPA in the Promotion of Human Rights in Business Sector*" serta 1 (satu) agenda tambahan untuk Komisi Sosial yaitu "Role of AIPA in Advancing the Post 2015 Development Agenda".

Delegasi Brunei, Singapura, Myanmar, Kamboja menyatakan bahwa usulan yang diajukan Indonesia memang penting, namun diperlukan waktu yang lebih panjang untuk mempertimbangkan proposal tersebut. Beberapa negara menyarankan untuk membahas ketiga Draft Resolusi tersebut pada Sidang AIPA 35 tahun 2014 mendatang. Delegasi Malaysia mendukung usulan Indonesia, karena apabila ditunda sampai tahun depan, akan sangat terlambat karena ASEAN Community akan diimplementasikan dalam waktu kurang dari 2 tahun mendatang. Delegasi Thailand dan Vietnam juga memberikan pendapat serupa. Delegasi Laos tidak keberatan terhadap draft usulan Indonesia, Thailand, dan Vietnam, namun waktu yang tersedia untuk setiap sidang komisi juga harus diperhatikan. Sebaiknya setiap komisi tidak membahas lebih dari 2 (dua) draft resolusi. Menanggapi hal tersebut, Dr. Marzuki Alie menyampaikan bahwa AIPA harus menyadari target bersama dalam implementasi ASEAN Community. Jangan sampai ASEAN pada akhirnya hanya dimanfaatkan oleh negara lain sebagai pangsa pasar potensial. Juga mengenai HAM dan bisnis, kita harus menyadari bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dalam konteks bisnis, sehingga menciptakan ketidakadilan antara pengusaha dan masyarakat. Kita juga harus memikirkan banyak hal mengenai target pembangunan pasca 2015, akan kemana ASEAN melangkah.

Delegasi Vietnam bersedia untuk menyatukan usulan agendanya mengenai "green growth" ke dalam usulan Draft Resolusi dari Indonesia yang berjudul "Promoting the Role of AIPA in Response to the Challenges of ASEAN Economic Community". DelRI juga setuju untuk mengurangi usulan Draft Resolusi untuk Komite Ekonomi menjadi hanya 1 (satu) agenda tambahan.

Sidang EXCOM akhirnya menerima usulan Delegasi DPR RI dan mengadopsi *agenda items* SIUM ke-34 AIPA.

Sidang Pleno Pertama

Pada Sidang Pleno Pertama, Ketua DPR RI, **Yth. Dr. Marzuki Alie**, selaku Ketua Delegasi Indonesia, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Parlemen Brunei sebagai tuan rumah Sidang Umum AIPA ke 34. Beliau menganggap bahwa tema Sidang Umum AIPA kali ini memang tepat, mengingat kita akan menuju ASEAN Community pada tahun 2015. Para anggota parlemen di kawasan harus turut berpartisipasi dalam menyukseskan integrasi regional dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat terakomodasi dan bahwa ASEAN menghargai kekayaan dan ragam budaya dari masing-masing negara. Selama beberapa tahun terakhir, negara-negara ASEAN telah mencapai beberapa hal, diantaranya adalah diratifikasinya UN Convention mengenai isu korupsi oleh Parlemen Myanmar. Dalam isu sosial-ekonomi, Parlemen Indonesia sangat mendukung pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) serta terciptanya komunitas ekonomi ASEAN yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Secara

khusus, Ketua DelRI secara khusus memberikan perhatian terhadap pentingnya sektor usaha untuk juga menghormati hak-hak asasi manusia demi kesejahteraan masyarakat. Di sektor sosial, DelRI juga menyuarakan pentingnya agenda pembangunan pasca 2015. Dr. Marzuki Alie juga menyampaikan bahwa DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Umum *Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC)* pada tanggal 23 – 24 Oktober 2013 di Medan, Sumatera Utara. Sidang tersebut diharapkan dapat mendorong upaya pemberantasan korupsi di kawasan dan berkontribusi pada upaya pembentukan Komunitas ASEAN. Dalam kesempatan itu, beliau mengharapkan partisipasi para delegasi AIPA dalam Sidang tersebut. Selain itu, secara khusus, Ketua DelRI menyampaikan dukungan terhadap Parlemen Timor Leste untuk bergabung sebagai observer AIPA.

Sidang Pleno Pertama ini telah menyetujui *Program of Activities of the 34th General Assembly* dan *Agenda Items for the 34th General Assembly*.

Sidang Komisi Politik

Sidang Komisi Politik dipimpin oleh **Hon. Datin Paduka Dyg Hjh. Salbiah**, anggota parlemen Brunei Darussalam, dan dihadiri oleh wakil-wakil parlemen anggota AIPA. Delegasi DPR RI terdiri dari **Yth. Sdr. Muhammad Oheo Sinapoy** dan **Yth. Sdri. Ida Ria Simamora**.

Komisi Politik membahas draft resolusi tentang “*Supporting the ASEAN Political Security Community*”, usulan Brunei Darussalam. Delegasi Brunei Darussalam menyampaikan bahwa draft resolusi menggarisbawahi peran konstruktif AIPA dalam mendukung pencapaian *ASEAN Political Security Community (APSC) 2015*, terutama dalam mengupayakan harmonisasi peraturan dan perundang-undangan di antara negara anggota ASEAN serta membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pembentukan APSC 2015.

Menanggapi draft tersebut, para anggota parlemen AIPA pada umumnya menyepakati pentingnya komitmen dan dukungan penuh AIPA dalam mewujudkan APSC 2015. Para anggota parlemen AIPA juga menyadari bahwa meskipun berbagai kemajuan telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi, termasuk dalam mengimplementasikan secara penuh *APSC Blueprint*.

Selain memberikan pandangan umum, para anggota parlemen AIPA, termasuk Indonesia, juga memberikan berbagai usulan amandemen pada draft resolusi. Dalam hal ini, delegasi Vietnam sempat mengusulkan penambahan paragraf mengenai pentingnya AIPA ikut memastikan keamanan di wilayah Laut China Selatan (LCS). Menanggapi usulan tersebut, *Chairperson* menyampaikan bahwa draft resolusi kiranya tidak mengangkat pandangan-pandangan yang dikhawatirkan dapat

mengganggu perkembangan positif pembahasan isu LCS di antara pemerintah ASEAN.

Guna mengakomodir pandangan *Chairperson* dan delegasi Vietnam tersebut, Delegasi RI mengusulkan satu paragraf yang menggarisbawahi komitmen penuh AIPA dalam mendukung upaya ASEAN memastikan keamanan, stabilitas dan perdamaian di kawasan, tanpa secara khusus menyebutkan Laut China Selatan. Sdr. Muhammad Oheo Sinapoy menyampaikan bahwa agar Draft Resolusi mengakomodasi adanya tantangan keamanan yang bersifat kompleks yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. serta pentingnya kerjasama yang lebih erat antar anggota parlemen. Usulan Indonesia tersebut akhirnya dapat diterima dan dimasukkan dalam draft resolusi.

Di akhir pertemuan, Sidang menyepakati untuk mengadopsi draft resolusi "*Supporting The ASEAN Political Security Community 2015*" dan mengadopsi laporan pertemuan ke-5 *AIPA Caucus* yang telah diselenggarakan di Da Lat, Viet Nam pada tanggal 12-13 Mei 2013. Pertemuan AIPA Caucus merupakan mekanisme di AIPA untuk memonitor implementasi rekomendasi-rekomendasi yang telah dihasilkan Sidang Umum AIPA dan mendorong harmonisasi legislasi terkait isu-isu yang menjadi perhatian bersama di kawasan, yang dapat mendukung pembangunan Komunitas ASEAN 2015.

Sidang Komisi Ekonomi

Sidang Komisi Ekonomi dipimpin oleh **Hon. Haji Awang Ahmad Morshidi**, anggota parlemen Brunei Darussalam, dan dihadiri oleh wakil-wakil parlemen anggota AIPA. Delegasi DPR RI terdiri dari **Yth. Sdr. Ir. Atte Sugandi** dan **Yth. Sdr. H. Iskan Qolba Lubis, MA**.

Sidang membahas 2 (dua) draft resolusi mengenai "*Fostering the Growth and Sustainable Development of Small and Medium Enterprises (SMEs)*" usulan Brunei dan "*Promoting the Role of AIPA in Response to the Challenges of ASEAN Community and Supporting Green Growth*" yang merupakan usulan bersama Indonesia dan Vietnam.

Draft resolusi "*Fostering the Growth and Sustainable Development of Small and Medium Enterprises (SMEs)*" dibuat sejalan dengan kesepakatan *ASEAN Leaders* pada KTT ke-22 ASEAN, April 2013 di Brunei Darussalam dan Resolusi SIUM ke-33 AIPA tentang SMEs, yang menekankan pentingnya dukungan AIPA dalam upaya peningkatan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru, guna meningkatkan kapasitas dan daya saing.

Semua delegasi pada prinsipnya mendukung draft resolusi dengan memberikan masukan mengenai perlunya dukungan parlemen bagi pembentukan *National SME*

Development Fund, peningkatan akses finansial bagi SME (usulan Indonesia), bantuan intra ASEAN dan eksternal ASEAN (usulan Laos) serta penyediaan infrastruktur dan kondisi yang memadai bagi SMEs (usulan Vietnam). Delegasi DPR RI mengajukan masukan dan usulan amandemen, diantaranya memasukkan satu paragraf preamble baru, yaitu "*Recalling the 45th ASEAN Economic Ministers' Meeting Joint Statement, issued in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, on 19 August 2013, which called for the establishment of the national SME development funds and enhancement of SME access to finance*" satu paragraf operative baru, yaitu "*Provide government support, where necessary, to equip SMEs with better access to financing including through the establishment of National SME Development Funds*".

Adapun terhadap Draft Resolusi "*Fostering the Growth and Sustainable Development of SME (Small Medium Enterprise)*", Sidang mendukung pandangan Indonesia mengenai pentingnya peran AIPA dalam merespon tantangan pembentukan *ASEAN Economic Community (AEC) 2015*. Hal ini didasari pemahaman bahwa pembentukan AEC semakin dekat dan oleh karenanya negara anggota ASEAN perlu mempersiapkan diri secara lebih baik lagi agar mampu menjawab tantangan yang dihadapi dalam proses pembentukan AEC 2015.

Delegasi DPR RI menyampaikan bahwa dalam menghadapi implementasi ASEAN Economic Community yang akan berlangsung dalam 1 tahun 3 bulan mendatang, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh ASEAN, diantaranya disebabkan oleh kesenjangan pembangunan antar negara ASEAN. Selain itu, ASEAN juga harus berupaya meningkatkan daya saing kawasan. Negara-negara ASEAN harus saling bekerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan. Sementara itu, Viet Nam menyuarakan pentingnya "green growth", yaitu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan lebih jauh terhadap lingkungan, yaitu dengan pengaplikasian teknologi rendah karbon.

Pandangan Vietnam mengenai pentingnya mendukung promosi *green growth* juga mendapat dukungan dari Sidang. Namun demikian, Sidang belum dapat mendukung usulan tentang pembentukan *Green Growth Center*, karena sebagai inisiator, Vietnam perlu menyampaikan terlebih dahulu informasi menyeluruh untuk dipelajari oleh negara anggota AIPA.

Sidang Komisi Ekonomi menyetujui 2 (dua) Draft Resolusi tersebut untuk disampaikan dan diadopsi pada Sidang Pleno Kedua.

Sidang Komisi Sosial

Sidang dipimpin oleh **Hon. Muhd. Syafiee bin Hj Ahmad**, anggota parlemen Brunei Darussalam, dan dihadiri oleh wakil-wakil parlemen anggota AIPA.

Delegasi RI terdiri dari **Yth. Sdri. Dra. Okky Asokawati** dan **Yth. Sdri. Vanda Sarundajang**.

Sidang membahas 3 (tiga) draft resolusi yaitu: “*Nurturing and Enhancing the Role of Young People to Meet the Future Challenges of ASEAN*” usulan Brunei Darussalam; “*Role of AIPA in Advancing the Post 2015 Development Agenda*” usulan Indonesia; dan, “*Cooperation Towards Child Abuse Free ASEAN*” usulan Thailand.

Draft Resolusi “*Nurturing and Enhancing the Role of Young People to Meet the Future Challenges of ASEAN*” menggarisbawahi tentang pentingnya peningkatan kepedulian di kalangan generasi muda terhadap ASEAN dalam rangka mewujudkan Komunitas ASEAN 2015. Dalam kaitan ini, generasi muda ASEAN harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang melalui pendidikan formal dan non-formal, serta melalui pelatihan peningkatan kewirausahaan.

Draft Resolusi “*Role of AIPA in Advancing the Post 2015 Development Agenda*” menggarisbawahi pentingnya peran AIPA dalam mendukung upaya-upaya para Pemimpin ASEAN dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan pasca 2015 berdasarkan *Millenium Development Goals* (MDGs) 2015. Upaya ini dilakukan melalui pengurangan kesenjangan pembangunan, pemberian perlindungan sosial, kerjasama pendidikan berkualitas, jaminan keamanan pangan dan energy, serta jaminan kesehatan guna memastikan kesejahteraan generasi mendatang. Dengan mengacu pada *Sustainable Development Goals* (SDGs), para anggota Parlemen AIPA juga harus memperbarui komitmen untuk melanjutkan target pembangunan regional pasca 2015.

Draft Resolusi “*Cooperation Towards Child Abuse Free ASEAN*” menggarisbawahi bahwa anak adalah aset masa depan yang akan menjadi faktor utama tercapainya perdamaian, kesejahteraan dan stabilitas di ASEAN. Implementasi penuh *ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint*, khususnya yang terkait perlindungan dari *child abuse*, perlu segera dilaksanakan. Dalam hal ini, peran AIPA adalah meninjau kembali undang-undang yang telah ada maupun pembuatan undang-undang baru guna memantau dan memberantas praktek perdagangan anak, prostitusi dan pornografi terhadap anak.

Sidang menyetujui 3 (tiga) Draft Resolusi tersebut untuk disampaikan dan diadopsi pada Sidang Pleno Kedua. Sidang juga menyetujui *Report of the Meeting of the 10th AIPA Fact Finding Committee to Combat the Drug Menace (AIFOCOM) held in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam*.

Sidang Komisi Organisasi

Sidang dipimpin oleh **Hon. Dato Paduka Awang Haji Abdullah**, anggota parlemen Brunei Darussalam, dan dihadiri oleh wakil-wakil parlemen anggota AIPA. Delegasi DPR RI terdiri dari **Yth. Dr. Surahman Hidayat, MA** dan **Sdr. H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, S.H.**

Sidang membahas berbagai isu organisasi, seperti anggaran, struktur organisasi, amandemen Statuta AIPA terkait bendera dan tempat tinggal Sekretaris Jenderal AIPA. Adapun topik yang menjadi perhatian adalah pembelian apartemen bagi Sekretaris Jenderal AIPA di Jakarta. Simpanan dari iuran para anggota AIPA telah mencapai US\$ 1,4 juta. Harga apartemen yang layak berkisar US\$ 700 ribu. Anggota meminta parlemen Indonesia untuk meneliti lebih jauh peraturan dan hukum di Indonesia.

Disepakati pula pembuatan bendera AIPA dengan latar berwarna hijau dan logo AIPA di posisi tengah. Bendera AIPA untuk pertama kali dipasang pada saat upacara penutupan tanggal 22 September 2013. Laos menyambut baik penunjukannya sebagai tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-35 yang akan diselenggarakan di Vientiane pada tanggal 14-20 September 2014.

Sidang juga membahas kelanjutan kerjasama AIPA dengan the *German Federal Foreign Office* (FFO) melalui *GIZ and Hans Seidel Foundation*. Sidang menyepakati pembayaran honorarium bagi *integrated expert FFO* tidak lagi dibebankan pada anggaran AIPA, melainkan pada anggaran pemerintah Jerman.

Sidang Komisi Organisasi menyetujui 19 (sembilan belas) Draft Resolusi untuk disampaikan dan diadopsi pada Sidang Pleno Kedua.

DIALOGUE WITH OBSERVERS

Pada sesi dialog dengan Peninjau, masing-masing Anggota Delegasi DPR RI berpartisipasi aktif dan menyampaikan kepentingan Indonesia dalam pertemuan yang dilaksanakan secara parallel.

Jepang

Pertemuan dipimpin oleh **Hon. Haji Ahmad Morshidi**, anggota Parlemen Brunei Darussalam, serta dihadiri oleh wakil-wakil parlemen anggota AIPA dan perwakilan Jepang, **Hon. Ms. Takagai Emiko**, **Hon. Mr. Tanaka Naoki** dan **Hon. Mr. Araki Kiyohiro**. Delegasi DPR RI terdiri dari **Yth. Sdr. Ir. Atte Sugandi** dan **Yth. Sdri. Ida Ria Simamora**.

Di awal pertemuan, Parlemen Jepang menyampaikan bahwa tahun 2013 ditandai dengan 40 tahun hubungan ASEAN - Jepang. Dalam kaitan ini, Parlemen Jepang

mengundang anggota AIPA untuk berkunjung ke Jepang guna membahas isu-isu yang menjadi perhatian bersama ASEAN dan Jepang.

Negara-negara ASEAN menyampaikan penghargaan terhadap Jepang sebagai mitra utama ASEAN dalam berbagai sektor, seperti bantuan pembangunan, perdagangan, pariwisata dan lain-lain. Diharapkan Jepang dapat terus memelihara dan meningkatkan hubungan yang sudah berjalan dengan baik dan produktif ini. Negara-negara anggota ASEAN juga menawarkan potensi kerja sama baru, seperti menjadikan Thailand sebagai tempat peristirahatan para lansia Jepang.

Delegasi RI menyampaikan pentingnya meningkatkan kerjasama antara parlemen AIPA-Jepang. Diharapkan Jepang dapat meningkatkan kerjasama di bidang *capacity building* dengan negara anggota ASEAN. Diharapkan pula Jepang dapat lebih mendukung *transfer of technology* dan kerjasama penelitian dengan negara anggota ASEAN, khususnya di bidang peningkatan produktivitas pangan, energi terbarukan dan program difersifikasi energy. Indonesia juga mengingatkan kembali tentang perlunya konfirmasi pihak Jepang untuk melakukan *review* terhadap *Indonesia-Japan Partnership Agreement (IJEPA)* yang akan dilakukan tahun ini. Indonesia juga ingin mempelajari tentang pengaturan sistem jaminan kesehatan di Jepang.

Menanggapi berbagai masukan, Pihak Jepang menegaskan kembali komitmennya dalam hubungan dengan ASEAN maupun dengan masing-masing negara dalam kerangka bilateral.

Belarus

Pertemuan dipimpin oleh **Hon. Mohd. Shafiee bin Ahmad**, anggota Parlemen Brunei Darussalam, serta dihadiri oleh wakil-wakil parlemen anggota AIPA dan perwakilan Belarus, **Hon. Mr. Vital Busko**. Delegasi DPR RI terdiri dari **Yth. Sdr. H. Iskan Qolba Lubis, M.A.** dan **Yth. Sdri. Selina Gita**.

Pertemuan mencatat perkembangan hubungan antara negara-negara ASEAN dan Belarus yang telah berjalan sejak tahun 1990 yang ditandai antara lain meningkatnya saling kunjung antara pejabat pemerintah dan parlemen yang menghasilkan berbagai perjanjian yang bermanfaat bagi peningkatan kerja sama antar negara anggota ASEAN dan Belarus.

Pada kesempatan ini, Delegasi Indonesia mendorong partisipasi aktif Belarus dalam meningkatkan kerjasama perdagangan dengan negara-negara ASEAN. Selama ini, hubungan bilateral Indonesia-Belarus sudah terjalin baik dan ditingkatkan melalui berbagai kegiatan saling kunjung dan penandatanganan sejumlah MoU, termasuk kunjungan Presiden Lukashenko ke Indonesia dan kunjungan Ketua DPR RI ke Belarus beberapa waktu lalu yang menyepakati kerjasama khusus antara provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Godno. Indonesia dan Belarus dapat menjembatani kerjasama antara kedua kawasan. Indonesia mendorong para praktisi bisnis Belarus

untuk berinvestasi di Indonesia, baik dalam bidang energi, infrastruktur, maupun bidang lainnya yang tercakup dalam MP3EI, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Pertemuan menyepakati perlunya peningkatan hubungan dan kerja sama antara negara-negara ASEAN dengan Belarusia dalam berbagai bidang, khususnya di bidang perdagangan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, energi terbarukan, pariwisata serta pertukaran pelajar dan tenaga ahli. Selain itu, pertemuan juga mencatat pentingnya mempromosikan investasi Belarusia di negara-negara anggota ASEAN yang diharapkan juga akan meningkatkan jumlah wisatawan Belarusia yang berkunjung ke negara-negara anggota ASEAN.

Kanada

Pertemuan dipimpin oleh **Hon. Haji Zulkipli bin Haji Abd. Hamid**, anggota Parlemen Brunei Darussalam, dihadiri oleh wakil-wakil parlemen anggota AIPA dan perwakilan Kanada, **Senator Daniel Lang** dan **Senator Donald Plett**. Delegasi DPR RI terdiri dari **Yth. Sdr. H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, S.H.**

Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal yang menjadi kepentingan bersama kedua pihak serta masing-masing parlemen negara anggota ASEAN dengan Kanada. Delegasi RI menyampaikan beberapa pandangan berikut:

- a. Hubungan Indonesia dan Kanada telah berlangsung dengan baik di segala bidang, khususnya kerjasama pembangunan, perdagangan, investasi dan kolaborasi dalam isu Hak Asasi Manusia (HAM), dialog lintas agama dan pendidikan. Dalam bidang perdagangan bahkan Indonesia adalah pasar terbesar Kanada di Asia Tenggara.
- b. Dalam kerangka pembentukan *ASEAN Community*, Indonesia mengajak Kanada untuk lebih aktif mendukung peningkatan perdagangan ekstra ASEAN serta meminta Kanada untuk meningkatkan nilai perdagangan dengan negara anggota ASEAN.
- c. Meminta Kanada untuk dapat mengakui sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan hubungan perdagangan kayu dengan Kanada.
- d. Meminta pandangan Kanada tentang kemungkinan adanya *ASEAN Parliament* sebagaimana yang saat ini dimiliki oleh Uni Eropa.

Menanggapi hal tersebut, wakil Parlemen Kanada menyampaikan bahwa Kanada menyambut baik semua kerjasama dengan negara AIPA, khususnya dengan Indonesia yang merupakan mitra penting Kanada di kawasan. Khusus dalam masalah HAM, Kanada mengharapkan kerjasama yang lebih erat dengan Indonesia

untuk memajukan isu ini dan berbagi nilai bersama di berbagai kesempatan. Dalam SVLK dan ASEAN Parliament, Kanada menyampaikan akan mempelajari lebih lanjut dan berharap dapat melakukan diskusi lebih lanjut dengan Indonesia pada kesempatan lain.

Beberapa isu lain yang diangkat oleh anggota AIPA terhadap Kanada adalah dukungan bagi implementasi *ASEAN Connectivity*, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kerjasama pendidikan, dukungan bagi keamanan pangan di kawasan, peningkatan bantuan teknis dan perlindungan bagi pekerja asing.

Republik Rakyat China

Pertemuan dipimpin oleh **Hon. Pehin Goh King Chin**, anggota Parlemen Brunei Darussalam, serta dihadiri oleh wakil-wakil parlemen anggota AIPA dan perwakilan RRC, **Hon. Mr. Chi Wanchun** dan **Hon. Mr. Hou Yibin**. Delegasi RI terdiri dari **Yth. Sdri. Vanda Sarundajang** dan **Yth. Sdri. Dra. Okky Asokawati**.

Dalam sambutan pembukaannya, Parlemen RRC mengakui peran ASEAN yang kian kompetitif dan penting di kawasan Asia. Kehadiran banyaknya *observer* membuktikan daya tarik ASEAN yang semakin tinggi. Kerja sama ASEAN – RRC di bidang perdagangan telah mencapai dekade keemasan dan sekarang akan menuju dekade berlian.

Ke-10 negara anggota AIPA peserta menganggap RRC telah sukses di bidang perdagangan, khususnya memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan peserta mengharapkan *sharing* pengalaman. RRT menanggapi bahwa UKM di China meningkat sedikit demi sedikit dan ada mekanisme yang menaunginya. Adapun tantangan utama dalam mengembangkan UKM adalah sumber daya manusia dan kebutuhan akan modal. Dalam hal ini, RRT mengimplementasikan kebijakan yang mencakup *legal framework*, *preferential policy* dalam hal pajak dan finansial dan kebijakan khusus untuk mengembangkan UKM.

Federasi Rusia

Pertemuan dipimpin oleh **Hon. Pehin Dato Haji Yaakub**, anggota Parlemen Brunei Darussalam, serta dihadiri oleh wakil-wakil parlemen anggota AIPA dan perwakilan Russia, **Hon. Mr. Victor A. Seleznev** dan **Hon. Mr. Nikita Ivanov**. Delegasi DPR RI terdiri dari **Yth. Sdr. Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA**.

Dalam sambutannya, Delegasi Rusia menyampaikan ketertarikannya menjadi pengamat AIPA, karena ingin memperluas konektivitas dengan kawasan Asia Tenggara. Dua pertiga wilayah Rusia berada di Asia dan untuk itu Rusia menaruh perhatian serius dengan perkembangan di Asia, termasuk di Asia Tenggara. Di tahun 2012, nilai total perdagangan Rusia dengan negara-negara ASEAN mencapai USD 50,6 milyar. Dengan dibentuknya Dewan Bisnis Rusia untuk Kerja Sama dengan ASEAN diharapkan nilai perdagangan tersebut dapat ditingkatkan dan

menguntungkan kedua belah pihak. Rusia mendukung penuh AIPA dan ingin agar AIPA berjalan secara bebas tanpa tekanan dan tidak terbelah menjadi blok-blok antagonistik. Rusia juga menginginkan agar hubungan antar anggota AIPA berjalan berdasarkan hak yang setara dan terbuka.

Delegasi RI menyampaikan agar kerja sama Indonesia-Rusia di bidang pendidikan dapat ditingkatkan tidak hanya dalam hal kuantitas tetapi juga kualitas. Indonesia mengharapkan agar kerja sama alat utama sistem pertahanan (alutsista) dengan Rusia tidak hanya terbatas membeli produk saja, tetapi juga adanya transfer teknologi dalam hal pembuatan alutsista bersama dan riset bersama.

Delegasi Rusia menyetujui untuk meningkatkan kerja sama pendidikan dengan Indonesia baik secara kuantitas dan kualitas. Disampaikan saat ini Kementerian Pendidikan Rusia sedang menyusun rencana untuk memberikan beasiswa yang efektif dan kompetitif bagi negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara akan mendapatkan prioritas. Kerja sama industri pertahanan dan alih teknologi dimungkinkan dengan dasar yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai contoh, kerja sama kerdigantaraan yang mencakup transfer teknologi sangat memungkinkan melalui kolaborasi antara Sukhoi dengan industri penerbangan di Indonesia.

Parlemen Eropa

Pertemuan dipimpin oleh **Hon. Haji Ahmad Morshidi bin Pehin Haji Awang Abdul Rahman**, Anggota Parlemen Brunei Darussalam serta dihadiri oleh wakil-wakil parlemen anggota AIPA dan perwakilan Parlemen Eropa: **Hon. Mr. Werner Langen** dan **Hon. Mr. Robbert Goebbels**. Delegasi DPR RI terdiri dari **Yth. Sdr. H. Andi Anzhar Cakra Wijaya**.

Dalam sambutannya, Parlemen Eropa mengakui tantangan yang dihadapi AIPA dan ASEAN khususnya, dalam mewujudkan AEC dalam waktu kurang dari dua tahun. Dalam hal ini, Parlemen Eropa berbagi pengalaman dari sejarah berdirinya Uni Eropa. Uni Eropa membutuhkan waktu lebih dari 25 tahun untuk dibentuk dan sampai sekarang masih ada beberapa masalah yang belum terpecahkan, misalnya masalah krisis yang muncul baru-baru ini di Spanyol dan Portugal serta masalah Euro sebagai mata uang bersama mereka. Berdasarkan pengalaman berharga dan fakta bahwa negara-negara anggota ASEAN dianggap sebagai mitra yang paling penting di Asia Pasifik, Parlemen Eropa berkeinginan untuk terus memberikan dukungan yang diperlukan dan menjadi mitra dekat bagi AIPA untuk mewujudkan AEC pada 2015.

Seluruh delegasi mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi terhadap bantuan Uni Eropa yang telah diberikan untuk meningkatkan pembangunan negara-negara anggota ASEAN di berbagai sektor seperti perdagangan, UKM, daerah pedesaan,

pendidikan, kesehatan, pembangunan hak azasi manusia dan *capacity building* dalam pemerintahan dan parlemen.

Parlemen Eropa memberikan contoh kerjasama antara Uni Eropa dan Vietnam untuk mempromosikan kebebasan berekspresi dan peraturan etnis minoritas di Vietnam. Contoh lain adalah bantuan Uni Eropa untuk Laos dan Kamboja yang menekankan pada aliran investasi terutama di bidang infrastruktur, peningkatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia.

Mengenai tumbuhnya kepercayaan terhadap Zona Euro serta Euro sebagai mata uang bersama, Parlemen Eropa menekankan pentingnya menjaga disiplin fiskal yang kuat di antara negara-negara anggotanya. Sebagai contoh, selama krisis di Spanyol dan Portugal, negara-negara anggota Uni Eropa mengkomunikasikan anggaran mereka serta bersama-sama dengan Parlemen Eropa, menggunakan instrumen yang kuat untuk menghasilkan kebijakan umum yang bertujuan untuk mengurangi dampak dari krisis.

Pada akhir pertemuan, Parlemen Eropa menyampaikan bahwa dalam tiga tahun terakhir, tidak ada yang bisa diputuskan di Eropa tanpa dukungan dari Parlemen Eropa. Butuh waktu hampir 50 tahun bagi Parlemen Eropa untuk mencapai posisi yang kuat seperti sekarang. Oleh karena itu, Parlemen Eropa menyambut inisiatif AIPA untuk terlibat dalam kerjasama yang lebih erat antara kedua lembaga untuk belajar dari pengalaman mereka. Parlemen Eropa juga mengundang perwakilan AIPA untuk mengunjungi *European Parliament Headquarters* untuk melihat cara kerja Parlemen Eropa.

India

Pertemuan dipimpin oleh **Hon. Haji Zulkipli bin Haji Abd. Hamid**, anggota Parlemen Brunei Darussalam, serta dihadiri oleh wakil-wakil parlemen anggota AIPA dan perwakilan India, **Hon. Mr. P. Vishwanathan**. Delegasi DPR RI terdiri dari **Yth. Sdr. H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, S.H.**

Pertemuan mencatat perkembangan hubungan antara negara anggota ASEAN dengan India khususnya dalam 4 tahun terakhir yang mengalami peningkatan sejalan dengan dilaksanakannya *Plan of Action 2010-2013*. Penekanan hubungan antara ASEAN dan India adalah pada sektor ekonomi, keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi (teknologi terbaru dan teknologi angkasa).

India adalah mitra dagang peringkat 6 terbesar ASEAN dan merupakan peringkat ke 7 penanam modal asing di ASEAN. Kerja sama kedua pihak yang telah berjalan dengan baik selama ini dan diharapkan dapat terus berlanjut dan berkontribusi pada upaya pembentukan 3 pilar Komunitas ASEAN 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, kedua pihak menyepakati pentingnya peningkatan kerja sama, dialog, dan

pertukaran ide antara generasi muda, para peneliti dan akademisi, diplomat dan pengusaha.

Pertemuan juga mencatat dukungan anggota AIPA pada penyusunan peraturan/undang-undang baru terkait perlindungan terhadap wanita dan upaya untuk mengurangi kekerasan dan eliminasi pekerja anak. Terkait potensi perdagangan antara kedua pihak, Indonesia menyatakan dukungan kepada parlemen India untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna menciptakan kondisi perdagangan yang stabil antara kedua pihak. Indonesia juga menyampaikan ide pembentukan organisasi parlemen serupa dengan parlemen Uni Eropa yang diharapkan dapat menciptakan kondisi lingkungan bisnis yang kondusif bagi pencapaian *Free Trade Agreement*.

Delegasi India menyampaikan bahwa kerjasama India dengan negara-negara ASEAN telah terjalin dengan baik, terutama dalam bidang ekonomi sebagai bagian dari strategic partnership. Sedikitnya sebanyak 60 event kerjasama telah diselenggarakan di negara-negara ASEAN. Tahun lalu, dalam pertemuan tingkat Menteri, telah didiskusikan berbagai potensi kerjasama, termasuk dalam bidang pertanian, investasi, dan pariwisata. India juga mendukung pembentukan *ASEAN Community*. *ASEAN-India Free Trade Area* diyakini akan meningkatkan potensi kerjasama antar kawasan, didukung oleh besarnya pangsa pasar potensial, yaitu lebih dari 1,5 milyar populasi. Target 200 milyar USD volume perdagangan ASEAN-India dapat direalisasikan. *Institutional connectivity* yang didukung dengan prinsip *mutual understanding* dapat meningkatkan hubungan antar masyarakat sekaligus *institutional relations* antara India dan ASEAN.

Pada kesempatan ini, Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa hubungan bilateral Indonesia-India telah terjalin selama 60 tahun. Semoga pertemuan ini dapat lebih meningkatkan kerjasama India dengan negara-negara anggota AIPA. DelRI menyampaikan keprihatinan terhadap berita mengenai kekerasan terhadap perempuan yang baru-baru ini terjadi di India. Lok Sabha telah mengesahkan UU baru mengenai perlindungan terhadap perempuan, semoga hal ini bisa meningkatkan mekanisme perlindungan terhadap perempuan di India. Sampai saat ini, setidaknya ada 40 perusahaan India yang berinvestasi di sektor pertambangan di Indonesia. India juga merupakan importir terbesar untuk produk CPO Indonesia. Semoga kerjasama ekonomi antara kedua negara dapat terus ditingkatkan. DelRI mengajak Parlemen India untuk terus bekerjasama dalam mempromosikan demokrasi dan dalam hal pemberantasan korupsi.

SIDANG JOINT COMMUNIQUE

Sidang Joint Communique dipimpin oleh **Hon. Haji Zulkipli bin Haji Abd. Hamid**, Anggota Parlemen Brunei Darussalam serta dihadiri oleh wakil-wakil parlemen anggota AIPA. Delegasi DPR RI terdiri dari **Yth. Sdr. Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA** dan **Yth. Sdr. Ir. Atte Sugandi**.

Selain memberikan *highlight* pidato Ketua Delegasi RI, Dr. H. Marzuki Alie, yang disampaikan pada Sidang Pleno Pertama, Delegasi Indonesia juga aktif memberikan usulan amandemen terhadap Draft *Joint Communique*. DelRI menyampaikan masukan mengenai format penulisan untuk bagian *committee meetings on political matters* pada *Joint Communique*, yang kemudian disetujui oleh para Delegasi AIPA dan digunakan sebagai panduan format penulisan untuk *committee meetings on economic, social, organizational matters*, dan WAIPA.

LAIN-LAIN

Lunch Meeting with Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)

Lunch Meeting with Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA) merupakan Side Event Sidang Umum ke-34 AIPA yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2013 dihadiri oleh para Anggota Parlemen Wanita, baik dari Parlemen Anggota AIPA maupun *Observer* dan *Guest of the Host*.

Bilateral Meeting Ketua DPR RI

Di sela-sela persidangan, Ketua DPR-RI juga melaksanakan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Singapura, **H.E. Madame Halimah Yacob**, pada tanggal 20 September 2013. Pertemuan membahas hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketua DPR-RI menyampaikan selamat kepada Madame Halimah Yacob yang telah terpilih sebagai Speaker baru Parlemen Singapura dan mengundang untuk berkunjung ke Indonesia.
- b. Indonesia mengangkat isu tentang perjanjian ekstradisi yang sudah ditandatangani kedua Negara pada tahun 2007 namun belum juga diratifikasi oleh kedua Negara, karena dikaitkan dengan perjanjian kerjasama pertahanan.
- c. Ketua DPR-RI juga mengundang *Speaker* Parlemen Singapura untuk berpartisipasi pada pertemuan SEAPAC di Medan, 23-24 Oktober 2013, sebagai bagian dari upaya bersama dalam melawan korupsi.
- d. *Speaker* Parlemen Singapura menanggapi bahwa isu perjanjian ekstradisi merupakan masalah yang sudah cukup lama tertunda dan mengharapkan isu

tersebut dapat dibicarakan lebih lanjut pada tingkat Kepala Negara antara kedua negara.

- e. *Speaker* Parlemen Singapura juga menyampaikan berkeinginan untuk hadir atau mengirimkan perwakilan pada pertemuan SEAPAC di Medan pada bulan Oktober mendatang.

D. HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Setelah melakukan pembahasan terhadap agenda sebagaimana tersebut di atas melalui sidang-sidang dengan perdebatan yang cukup hangat dan panjang, Sidang Umum ke-34 AIPA di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, telah menghasilkan 7 (tujuh) *Report* Sidang yaitu: *Report of the Committee of Political Matters; Report of Committee on Economic Matters; Report of Committee on Social Matters; Report of Committee on Organizational Matters; Report of Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA); Report of Committee on Joint Communiqué; dan Report of Committee on Dialogue with Observers*; serta menghasilkan *Joint Communiqué* dan 7 (tujuh) Resolusi, yang 2 (dua) diantaranya merupakan usulan Indonesia.

Dari uraian tersebut di atas, secara singkat hasil-hasil Sidang Umum ke-34 AIPA yang tertuang dalam resolusi-resolusi yang disahkan dalam Pleno Kedua yaitu sebagai berikut:

Political Matters:

Supporting The ASEAN Political Security Community

Para anggota parlemen AIPA mendukung pembentukan ASEAN Political Security Community yang dapat menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan serta meningkatkan kontribusi untuk merealisasikan APSC. Isu-isu keamanan regional saat ini semakin luas, sehingga dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi aktif dari seluruh negara di kawasan dalam menyelesaikan berbagai tantangan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan ASEAN *awareness* baik di tingkat regional maupun nasional dan meningkatkan hubungan antar masyarakat.

APSC Blueprint merupakan mekanisme fundamental menuju tercapainya ASEAN Political Security Community. Untuk memastikan bahwa Blueprint APSC diimplementasikan secara efektif, negara-negara anggota ASEAN harus bersatu untuk menciptakan kawasan yang stabil.

Economic Matters:

1. *Fostering The Growth And Sustainable Development Of SME (Small Medium Enterprise).*

Menyadari bahwa sektor UKM di ASEAN masih mengalami kesulitan terutama dalam hal pendanaan dan pengadaan modal. Sektor UKM perlu dikembangkan dengan dukungan dari berbagai pihak, sesuai dengan mandat yang tercantum dalam ASEAN Economic Community Blueprint. AIPA mendorong pemerintah negara-negara ASEAN untuk memfasilitasi pengembangan UKM dengan penyediaan infrastruktur yang memadai serta meningkatkan daya saing UKM di tingkat global.

Resolusi ini juga menekankan peran penting AIPA dalam merealisasikan tujuan-tujuan ASEAN Economic Community. Untuk dapat memfasilitasi pengembangan UKM, parlemen negara-negara ASEAN harus mengintensifkan perannya dalam mengharmonisasikan berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan liberalisasi perdagangan dan investasi.

2. *Promoting the Role of AIPA in Response to the Challenges of ASEAN Economic Community and Supporting Green Growth*

Menyadari bahwa dalam mengimplementasikan Komunitas Ekonomi ASEAN, masih banyak tantangan yang dihadapi, termasuk diantaranya adalah kesenjangan ekonomi dan pembangunan antar negara ASEAN. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan daya saing ASEAN, termasuk dengan melibatkan sektor swasta. Pertumbuhan ekonomi yang diupayakan oleh ASEAN harus berkelanjutan dengan mengedepankan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Negara-negara ASEAN juga harus mendorong kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara maju.

Peran parlemen harus lebih dioptimalkan untuk menyelesaikan berbagai isu dan memberikan solusi serta kebijakan yang tepat dalam rangka pembentukan *ASEAN Economic Community*, antara lain melalui pengadopsian *ASEAN agreements*, pengalokasian dana, serta melakukan pengawasan terhadap proses implementasi kebijakan. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan dengan itikad baik terhadap penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, memastikan kelestarian alam, serta memperhatikan aspek kemampuan sumber daya manusia.

Social Matters:

1. *Nurturing The Role Of Young People For The Future Challenges Of ASEAN*

Dalam menyambut pembentukan ASEAN Economic Community, diperlukan peran serta dan kontribusi aktif dari generasi muda, terutama dalam hal pembentukan lapangan kerja baru melalui kewirausahaan. Saat ini, sekitar 60 persen penduduk ASEAN berusia di bawah 35 tahun. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap isu regionalisme ASEAN yang memiliki kekayaan budaya serta mendorong kontribusi generasi muda terhadap pembentukan Komunitas ASEAN yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Generasi muda memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan serta memiliki posisi penting dalam upaya membangun solidaritas ASEAN. Generasi muda harus didorong untuk lebih terlibat dalam isu pembangunan pedesaan, penanganan bencana, pendidikan, kesehatan, serta pemberantasan kemiskinan. Pemerintah harus mempromosikan peningkatan kreatifitas generasi muda untuk mengurangi angka pengangguran.

2. *Role of AIPA in Advancing the Post 2015 Development Agenda*

Dengan semakin dekatnya target pencapaian MDGs pada 2015, para Parlemen anggota AIPA harus mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan pasca 2015 yang semakin kompleks. Kesenjangan ekonomi dan pembangunan di kawasan masih harus terus diatasi dan isu kemiskinan diperkirakan masih menjadi isu yang paling krusial. Oleh karena itu, Parlemen anggota AIPA harus mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan perlindungan/jaminan sosial bagi masyarakat.

Banyak negara ASEAN yang sudah menunjukkan kemajuan dalam mencapai MDGs, namun masih banyak yang harus diperbaiki. Diperlukan kerjasama global untuk melanjutkan agenda pembangunan pasca 2015 yang bertumpu pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), termasuk diantaranya mengenai ketahanan pangan dan energi serta memastikan peri kehidupan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

3. *Cooperation toward Child Abuse Free ASEAN*

Parlemen anggota AIPA menyadari bahwa anak-anak merupakan aset penting bagi kemajuan ASEAN, termasuk diantaranya untuk menjaga perdamaian, kesejahteraan, dan stabilitas kawasan. Negara-negara ASEAN harus memastikan bahwa anak-anak memperoleh sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai, dengan didukung oleh perlindungan sosial dan hukum. Negara-

negara ASEAN harus bekerjasama untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak, termasuk keterlibatan mereka sebagai objek perdagangan anak, prostitusi, dan pornografi.

Diperlukan partisipasi aktif baik dari sektor pemerintah maupun institusi legislatif untuk menghentikan praktek *child trafficking*, pornografi, dan prostitusi yang melibatkan anak-anak. Salah satu upaya yang diperlukan adalah dengan memberikan hukuman yang berat bagi para pelaku kejahatan. Parlemen anggota AIPA juga harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu terkait.

WAIPA:

Fostering Maternal and Child Health in ASEAN

Dengan berinvestasi pada kesehatan wanita dan anak-anak, maka negara-negara ASEAN sesungguhnya berinvestasi pada masa depan yang lebih baik. Target MDG4 dan MDG5 merupakan dua target MDGs yang progress pencapaiannya kurang signifikan, maka komitmen terhadap isu ini harus terus dilanjutkan pasca 2015.

Diperlukan peningkatan komitmen para anggota WAIPA untuk memperkuat peran parlemen dalam upaya memperbaiki kondisi kesehatan ibu dan anak di wilayah ASEAN berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama dan *mutual understanding*, terutama dalam rangka memenuhi Goal MDGs 4 dan 5. Upaya tersebut juga harus didukung oleh upaya untuk meningkatkan sarana dan pra sarana kesehatan serta kemampuan sumber daya manusia.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Sidang Umum ke-34 AIPA tanggal 17-23 September 2013 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, telah berlangsung dengan lancar dan sukses. Sidang telah mengesahkan 26 (dua puluh enam) resolusi terkait bidang Politik (1 resolusi), Ekonomi (2 resolusi), Sosial (3 resolusi), Organisasi (19 resolusi) dan WAIPA (1 resolusi)
2. Kontribusi Delegasi RI pada rangkaian SIUM antara lain terlihat dari diterimanya 2 (dua) usulan draft resolusi Indonesia masing-masing pada Komite Ekonomi dan Sosial. Delegasi RI juga telah memberikan berbagai masukan konstruktif terhadap draft resolusi yang dibahas pada masing-masing pertemuan

3. Partisipasi Delegasi DPR RI telah berjalan dengan sukses terbukti dengan apresiasi dari Parlemen-parlemen Anggota AIPA yang menerima amandemen dan Resolusi yang diusulkan oleh Delegasi Indonesia, yaitu 1 (satu) Resolusi di komisi politik dan 1 (satu) Resolusi di komisi ekonomi; yang juga merepresentasikan kepentingan masyarakat ASEAN, termasuk Indonesia
4. Dalam Sidang EXCOM, karena ketidaksiapan tuan rumah, sempat terjadi perdebatan yang cukup panjang terkait usulan draft resolusi Indonesia, Viet Nam dan Thailand yang diajukan kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum SIUM diselenggarakan. Meskipun pada awalnya ada keberatan dari delegasi AIPA lain, karena tuan rumah tidak mengedarkan draft resolusi tersebut sehingga tidak memberikan waktu yang cukup kepada anggota AIPA untuk mempelajarinya, namun pada akhirnya usulan dapat diterima dengan mempertimbangkan pentingnya usulan topik. Sementara usulan draft resolusi Indonesia mengenai “*the Role of AIPA in the Promotion of Human Rights in Business Sector*” direkomendasikan untuk dibahas pada SIUM ke-35 AIPA tahun 2014 di Vientiane, Laos

B. SARAN

1. Hasil Sidang Umum ke-34 AIPA berupa resolusi-resolusi di bidang WAIPA, Politik, Ekonomi, Sosial dan Organisasi memerlukan tindak lanjut implementasi dari masing-masing parlemen dan pemerintah negara-negara anggota AIPA
2. Dalam rangka implementasi resolusi-resolusi tersebut, maka DPR RI melalui komisi-komisi agar segera mengkomunikasikan hasil Sidang Umum ke-34 AIPA ke kementerian yang menjadi *counterpart*-nya
3. DPR RI diharapkan untuk meningkatkan kontribusinya di AIPA dengan menyumbangkan ide-ide baru terutama dalam pembentukan mekanisme implementasi efektif resolusi-resolusi yang dihasilkan AIPA
4. Mengingat kesulitan yang dialami oleh Delegasi Indonesia untuk mengajukan usulan Draft Resolusi, disarankan agar setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Sidang Umum AIPA ke 35 yang akan datang, Indonesia sudah mengirimkan draft rancangan resolusi yang akan diusulkan, baik kepada tuan rumah, Laos, maupun kepada Sekretariat AIPA dan seluruh AIPA *National Secretariats*

IV. PENUTUP

A. ANGGARAN

Biaya yang digunakan untuk melakukan perjalanan 13 (tiga belas) Anggota, Pendamping Ketua Delegasi, serta Pejabat dan Staf Sekretariat Jenderal DPR RI (Sekretaris Delegasi), Tenaga Ahli, Penterjemah, wartawan, dan Ajudan adalah Rp 1.168.715.340,-.

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran hasil-hasil persidangan sebagai berikut:

- *Report of the 34th AIPA General Assembly*
- *Report of Dialogue with Observers*
- *Report of Committee on Joint Communiqué*
- *Joint Communiqué*
- *Resolutions*
- Dokumentasi Foto

C. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan Delegasi DPR RI ke Sidang Umum ke-34 AIPA yang berlangsung pada tanggal 17-23 September 2013 di Brunei Darussalam. Dokumen terkait akan dijadikan lampiran. Atas nama delegasi, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada delegasi untuk melaksanakan tugas berat yang mulia demi bangsa dan negara Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, September 2013

a.n. Delegasi,
Pelapor

DR. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.
Ketua BKSAP/ A-75